

Hambatan Dalam Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas
Entah Ismanto,¹⁾ Indra Wahyudhi,¹⁾ Melfinna¹⁾

INFO NASKAH :

Diterima Mei 2022

Diterima hasil revisi Juni 2022

Terbit Juni 2022

Keywords :

Manusia, Disabilitas, Kesehatan, dan Pendidikan

ABSTRACT

Penyandang disabilitas yang hidup di negara-negara berkembang hidup dibawah garis kemiskinan. Penyandang disabilitas juga lebih rentan terhadap kemiskinan disetiap negara, sehingga kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Di Negara-negara Asia Tenggara, hampir semua negaranya termasuk Indonesia telah mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas (Arie, 2007).

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelainan intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016). Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas adalah suatu strategi yang didasari oleh seberapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kemampuan. Sebagai salah satu strategi pembangunan, pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam menentukan pilihan dalam mengambil keputusan serta tindakan dalam mengurangi hambatan-hambatan yang ada pada dirinya sendiri dengan meningkatkan kemampuan serta, rasa percaya diri.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terjadinya disabilitas juga dapat disebabkan penyakit dan kondisi kesehatan tertentu, bencana alam, kecelakaan, dan penyebab lainnya.

Penyandang disabilitas yang hidup di negara-negara berkembang hidup dibawah garis kemiskinan. Penyandang disabilitas juga lebih rentan terhadap kemiskinan disetiap negara, sehingga kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Di Negara-negara Asia Tenggara, hampir semua negaranya termasuk Indonesia telah mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas (Arie, 2007). Di Indonesia sendiri penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Kementerian Sosial menurut hasil pendataan pada tahun 2017 atau survey jumlah penyandang disabilitas di beberapa provinsi di Indonesia, sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Sekitar 67,33% penyandang

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi (e-mail : indra.wahyu@gmail.com)

Disabilitas dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan. Jenis keterampilan utama penyandang disabilitas adalah keterampilan pijat, pertukangan, petani, buruh dan jasa. Jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Jumlah penyandang disabilitas tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (50,900%) dan terendah ada di Provinsi Gorontalo (1,65%).

Dari kelompok umur, usia 18-60 tahun menempati posisi tertinggi. Kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat kaki (21,86%), mental retardasi (15,41%) (Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2017).

Pemahaman negatif tentang penyandang disabilitas antara lain berakar pada pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis atas dasar disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal diseluruh dunia (*Ollerton & Horsfall, 2013, p. 618*). Pemberdayaan disabilitas dapat dilihat dari perspektif sosial berakar dari sudut pandang mengenai perlunya kemandirian pada penentuan nasib sendiri, menentukan pilihan dan pandangan disabilitas untuk mendorong peniadaan “penindasan sosial” disabilitas (*Barnes & Mercer, 2010*). Pandangan demikian didasari dari terminologi disabilitas sebagai hambatan dari berbagai konteks untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat (*Judici, Favaretto, & Turchi, 2019*).

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelainan intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016). Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas adalah suatu strategi yang didasari oleh seberapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kemampuan. Sebagai salah satu strategi pembangunan, pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang digunakan iuntuk membantu masyarakat dalam menentukan pilihan dalam mengambil keputusan sserta tindakan dalam mengurangi hambatan-hambatan yang ada pada dirinya sendiri dengan meningkatkan kemampuan serta, rasa percaya diri (Safri Sholehuddin, 2020).

Permasalahan seperti itu juga masi dirasakan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. Meskipun sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 8 Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 16 ayat 1 dan 2 bahwa: Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan social bagi penyandang masalah kecacatan, Pemerintah Daerah mengupayakan:

- (a) memberikan kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan inprastruktur dan pelayanan sosial;
- (b) pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk motivasi, perawatan, pembinaan, kewirausahaan, bimbingan sosial dan bantuan sosial”.

Namun pada kenyataanya, dalam hal aksesibilitas ketersediaan sarana dan prasarana khusus penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi saat ini masi kurang diperhatikan. Hal itu dilihat dari tidak terpasangnya *guiding blocks* saat pembuatan trotoar di Cikarang Utara, sehingga pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai kurang ramah terhadap keberadaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. Padahal *guiding blocks* sangat berguna sebagai alur penentuan dan petunjuk bagi disabilitas khususnya

tuna netra. Lebih lanjut Dinas Sosial Kapupaten Bekasi melansir jumlah penyandang disabilitas Tahun 2019 yaitu sebanyak 1,030 orang, hal tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi Tahun 2019 yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel 1. jumlah penyandang disabilitas :

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi Tahun 2019

Keterangan	Disabilitas Mental	Disabilitas Fisik	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik	Jumlah
Kabupaten Bekasi	155	439	58	378	1.030

Sumber: *Jurnal of Government and Political Studies Vol. 4- No. 1*

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kelompok masyarakat yang termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah penyandang disabilitas. Atas dasar inilah kemudian dalam program-program pembangunan penyandang disabilitas hanya sebagai “penerima manfaat”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas belum dijadikan subjek pembangunan apalagi sebagai asset pembangunan. Diperlukan paradigma pembangunan baru yang secara adil dan merata melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pelibatan seluruh masyarakat secara aktif memunculkan istilah pembangunan inklusi. Inklusi dipandang sebagai suatu pendekatan yang mampu membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka dengan mengikutsertakan semua orang dari berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, dan budaya.

Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi. Melalui paradigma yang konstruktif dan berbasis HAM terhadap penyandang disabilitas, pembangunan inklusif pun dapat diwujudkan. Hal ini karena kelompok penyandang disabilitas tidak lagi menjadi “beban” pembangunan, melainkan menjadi aktor dalam pembangunan, tentu saja dengan dukungan akomodasi yang layak, tindakan *affirmative* dan aksesibilitas dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Dalam konteks pembangunan inklusif disabilitas terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip inklusi, equity, dan aksesibel. Penggunaan prinsip pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi ketidakmerataan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara, dan pengaruh antar individu/antar kelompok (termasuk individu/kelompok penyandang disabilitas) dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2016).

Tanpa adanya upaya mewujudkan pembangunan inklusif, penyandang disabilitas akan makin termarginalkan yang selanjutnya akan semakin memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan yang inklusif penyandang disabilitas agar dapat merumuskan langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menitik beratkan program pembangunan pada pemberdayaan penyandang disabilitas yang akan

meringankan beban pembiayaan jaminan sosial di masa yang akan datang, menjamin kesejahteraan sekaligus memberdayakan aset warga Negara.

Maksud dari kajian ini yaitu untuk memberikan arahan/rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sedangkan tujuan dari kajian ini yaitu merumuskan langkah-langkah strategis pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif

METODOLOGI

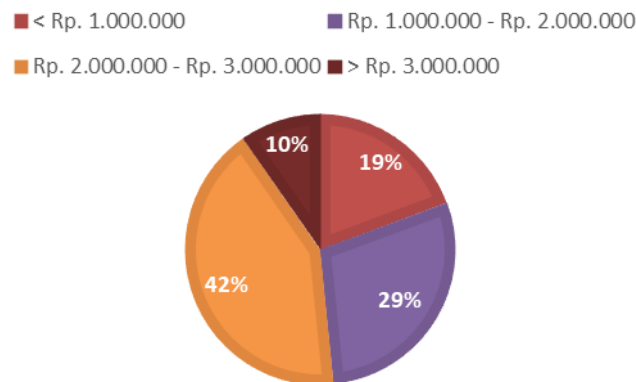
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, Observasi/ Survey Lapangan, Dokumentasi, Survey Instansional dan Studi Literatur. Lokasi kegiatan yang akan diamati yaitu Kabupaten Bekasi dengan objek kegiatan yaitu pedestrian, jembatan penyebrangan, transportasi umum, pendidikan, layanan kesehatan dan perkantoran. Penentuan lokasi sampel dilakukan berdasarkan Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Bekasi, ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 dimana Wilayah Pengembangan diarahkan untuk pengembangan wilayah berdasarkan potensi wilayah. Sementara, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Deskriptif merupakan salah satu macam metode kualitatif yang memberikan gambaran/ penjelasan suatu persepsi masyarakat secara lebih jelas. Selain itu, metode ini juga menerangkan hubungan sebab akibat, membuat prediksi serta mendapatkan implikasi dari suatu permasalahan yang terjadi dan dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Keputusan strategis perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan-pertimbangan penting untuk analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Tingkat Kemiskinan dan Akses terhadap Lapangan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

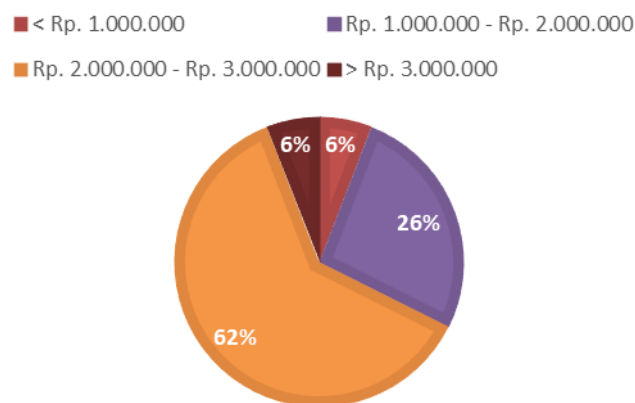
Berikut adalah informasi, ketersediaan, serta kondisi mengenai perkantoran menurut responden dan juga tingkat kemiskinan yang dilihat dari jumlah pendapatan dan pengeluaran per bulannya serta jumlah tanggungan keluarga:



Gambar 1. Persentase Pendapatan Per Bulan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

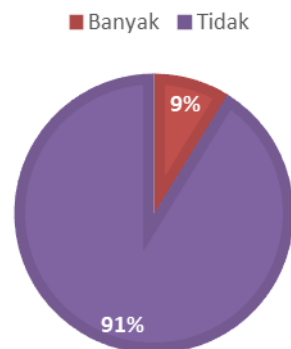
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas menjawab pendapatan perbulan yang dihasilkan yaitu Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 yaitu sebanyak 42%. Berikut adalah persentase pengeluaran per bulan



Gambar 2. Persentase Pengeluaran Per Bulan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

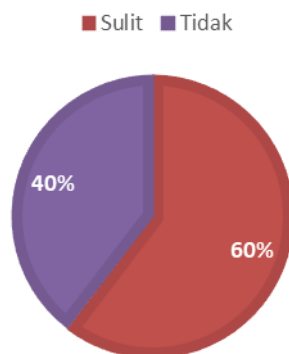
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas menjawab sebanyak 62% pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 yang dimana jumlah pendapatan hampir berbanding lurus dengan pengeluaran.



Gambar 3. Persentase Tingkat Ketersediaan Lowongan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas menjawab masih sedikitnya ketersediaan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi. berikut adalah persentase tingkat kesulitan dalam mencari pekerjaan



Gambar 4. Persentase Tingkat Kesulitan dalam Mencari Pekerjaan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas menjawab bahwa dalam mencari pekerjaan masih sulit ini disebabkan karena sedikitnya ketersediaan kebutuhan pegawai bagi penyandang disabilitas pada perusahaan di Kabupaten Bekasi. Berikut adalah sumber informasi mengenai lowongan pekerjaan

Berdasarkan hasil identifikasi mengenai tingkat kemiskinan dan akses terhadap lapangan pekerjaan rata-rata pendapatan responden setiap bulannya sebanyak Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 sedangkan untuk pengeluaran tiap bulannya pun sebanyak Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 dengan jumlah tanggungan keluarga rata-rata sebanyak 2 orang yang dimana jumlah pendapatan hampir berbanding lurus dengan pengeluaran. Dan untuk pencarian lowongan pekerjaan yang masih sulit karna sedikitnya ketersediaan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Identifikasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Mencapai Pembangunan Inklusif

Identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan inklusif didapat dari hasil wawancara dengan dinas-dinas terkait, diantaranya yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Puskesmas. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami dalam mencapai pembangunan inklusif:

- a) Sulitnya berkordinasi dengan antar dinas/instansi terkait
- b) Sulitnya mendapatkan data real mengenai jumlah penyandang disabilitas di Dinas Sosial
- c) Penyandang disabilitas yang selalu berpindah-pindah tempat penampungan/yayasan
- d) Tidak sinkronnya data lapangan dengan data yang ada diantar dinas
- e) Sulitnya melengkapi infrastruktur bagi penyandang disabilitas pada layanan kesehatan khususnya puskesmas yang sesuai dengan standar karena terkendala pada lahan puskesmas yang sempit dan terbatas sehingga infrastruktur yang sudah ada pun masih kurang ideal

- f) Infrastruktur public masih belum mempertimbangkan kebutuhan kaum difabel karena untuk pengadaan/pembangunan infrastruktur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hanya menunggu arahan dari Dinas Sosial jika ingin adanya pembangunan infrastruktur untuk penyandang disabilitas
- g) Kebijakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih belum semua mempertimbangkan kebutuhan kaum difabel/tidak ada kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas pada layanan kesehatan puskesmas
- h) Masih minimnya penyampaian aspirasi dari penyandang disabilitas
- i) Adanya peraturan daerah Kabupaten Bekasi yang membahas mengenai ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yaitu ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, dimana salah satu isi dari peraturan tersebut yaitu Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang cacat dengan mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Pekerja/Buruh dan/atau kualifikasi perusahaan.

Dalam perumusan strategi harus melihat dari dua sisi yaitu dari sisi internal dan eksternal sehingga dalam merumuskan strategi didapat hasil yang maksimal, pada sisi internal mengidentifikasi dari *strength*/kekuatan dan *weakness*/kelemahan setelah mengetahui kondisi internal dari segi *strength*/kekuatan dan *weakness*/kelemahan maka selanjutnya mengidentifikasi *Opportunities*/Peluang serta *Threats*/Ancaman dari sisi eksternal setelah didapat kondisi dari dua sisi maka dapat merumuskan strategi dari

Hasil identifikasi antara segi internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil tabel analisis diatas terdapat beberapa *strength* (kekuatan) dalam internal, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak puskesmas diketahui bahwa puskesmas selalu melakukan penyuluhan, pemeriksaan kesehatan dengan mengacu pada permenkes 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak puskesmas diketahui bahwa dalam pelayanan puskesmas kini tidak hanya melalui offline saja tetapi adanya akses layanan kesehatan yang sudah menggunakan *system online* yaitu menggunakan (Whatsapp)
3. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi maka pemberian informasi harus mengikuti pula dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini yaitu dengan melalui offline maupun online seperti menggunakan pamflet, penyuluhan, kunjungan-kunjungan serta melalui online/whatsapp agar pemberian informasi merata kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Kabupaten Bekasi diketahui bahwa pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan bagi penyandang disabilitas (pelatihan, aplikasi bagi tuna netra, dll)
5. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui ketersediaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di layanan pendidikan terutama pada sekolah umum hanya terdapat infrastruktur seperti handrail dan ramp akses saja sehingga sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi masih belum siap untuk dijadikan sebagai sekolah inklusi berdasarkan kelengkapan infrastruktur bagi penyandang disabilitas

6. Berdasarkan hasil observasi lapangan serta dilihat dari hasil dokumentasi lapangan diketahui bahwa kondisi infrastruktur yang sudah tersedia baik pada layanan pendidikan, kesehatan, pedestrian, dan perkantoran rata-rata masih memiliki kondisi yang baik hingga sedang

Sedangkan untuk *weakness*/kelemahan diantaranya:

1. Berdasarkan hasil wawancara belum adanya koordinasi antar SKPD dalam penyusunan program bagi penyandang disabilitas karena sulitnya
2. Berdasarkan survey instansional maupun survey sekunder tidak adanya data real jumlah penyandang disabilitas maupun sebaran disabilitas di Kabupaten Bekasi
3. Berdasarkan survey instansional maupun survey sekunder diketahui bahwa belum adanya database penyandang disabilitas yang selalu update tiap tahunnya ini dikarenakan data real jumlah penyandang disabilitas pun tidak ada sehingga tidak ada yang bisa untuk di update mengenai data jumlah penyandang disabilitas
4. Penyandang disabilitas yang selalu berpindah-pindah tempat/yayasan sehingga menyulitkan pendataan, ini merupakan salah satu faktor sulitnya mendapatkan data mengenai penyebaran/jumlah penyandang disabilitas disetiap kecamatan di Kabupaten Bekasi
5. Tidak meratanya informasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas, ini disebabkan karena adanya beberapa penyandang disabilitas yang selalu berpindah-pindah, dan juga karena penyandang disabilitas maupun pendampingnya tidak mengerti mengenai teknologi sedangkan informasi disebarkan melalui online sehingga informasi yang tersebar bisa saja tidak merata
6. Beberapa SKPD hanya menunggu arahan dari dinas/instansi terkait mengenai pengadaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas sehingga tidak dapat bergerak sebelum mendapatkan arahan. Berdasarkan hal ini maka perlu adanya peraturan khusus mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi dari segi pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana.
7. Tidak adanya program sekolah inklusi ini diketahui dari hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan bahwa belum adanya sekolah inklusi di Kabupaten Bekasi namun berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kardi Leo, dimana beliau merupakan salah satu penyandang disabilitas yang cukup berperan di Kabupaten Bekasi, yaitu sebagai: Ketua NPC Kab. Bekasi (NPC merupakan persatuan dan kesatuan antar insan olahraga penyandang disabilitas), Pemilik yayasan Abdul Majid mendirikan sekolah formal untuk SD dan SMP yang bernama SD SMP IT Al-Azma, serta Kandidat Doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan disiplin ilmu Manajemen Pendidikan Islam. Sehingga sekolah inklusi di Kabupaten Bekasi hanya terdapat di sekolah swasta sedangkan untuk sekolah negeri masih belum tersedia
8. Transportasi publik yang belum ramah disabilitas, ini jelas terlihat dari observasi lapangan bahwa transportasi publik masih belum memiliki fasilitas pendukung bagi para penyandang disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas merasa kesulitan jika akan bepergian menggunakan transportasi publik jika tidak bersama pendamping sehingga para penyandang disabilitas tidak bisa mandiri dalam melakukan suatu kegiatan
9. Kelengkapan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di layanan pendidikan, kesehatan, pedestrian, perkantoran, maupun transportasi publik masih kurang

lengkap. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa 90% ketersediaan fasilitas infrastruktur bagi penyandang disabilitas masih belum tersedia baik dari segi pelayanan pendidikan, kesehatan, pedestrian, perkantoran, maupun transportasi publik. Sehingga Kabupaten Bekasi masih belum mengarah ke pembangunan inklusif

10. Belum adanya kebijakan kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak perusahaan dalam penyediaan lapangan kerja. Namun terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dimana pada pasal 26 dikatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada Perusahaannya” namun tidak ada sanksi bagi perusahaan jika tidak mempekerjakan penyandang disabilitasnya di perusahaan. Maka seharusnya perlu adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menerima tenaga kerja penyandang disabilitas serta pada peraturan tersebut tidak dikatakan bahwa setiap instansi/badan/maupun pemerintah juga wajib menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 2% jika berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja. Sehingga masih kurang lengkapnya aturan mengenai penyandang disabilitas didalam Peraturan Daerah tersebut.
11. Pemerintah belum memiliki fasilitator bagi penyandang tuna rungu seperti fasilitator untuk bahasa isyarat, seharusnya dalam setiap pelayanan baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur public, dll harus mencakup semua jenis penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna rungu. Karena jika dilihat dari kondisi eksisting fasilitas yang tersedia hanya diperuntukan bagi penyandang tuna netra (guiding block) maupun tuna daksa (handrail, akses kursi roda)
12. Kantor pelayanan pemerintah masih belum menyediakan sarana prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas, ini dikarenakan pada kantor-kantor pemerintahan masih belum adanya tenaga kerja penyandang disabilitas sehingga untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas tidak dijadikan sebagai prioritas utama
13. Belum adanya program khusus bagi penyandang disabilitas di dokumen RPJMD Pada sisi eksternal terdapat *Opportunities*/Peluang serta *Threats*/Ancaman, berikut adalah *Opportunities*/Peluang dari sisi eksternal:
 1. Berdasarkan data dari Kantor Cabang Dinas Wilayah III Provinsi Jawa Barat masih banyaknya penyandang disabilitas yang pernah bersekolah maupun sedang bersekolah di Kabupaten Bekasi, sehingga ini bisa dijadikan sebagai peluang bagi para penyandang disabilitas untuk bersaing di dunia luar baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal pekerjaan
 2. Cukup tingginya penyandang disabilitas yang antusias mengikuti pelatihan untuk persiapan kerja, ini dilihat dari hasil kuesioner di lapangan bahwa banyak penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja untuk dapat bersaing dengan dunia luar maupun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga para penyandang disabilitas dapat melakukan kegiatan dengan mandiri jika didukung dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan
 3. Penyandang disabilitas dominan memiliki jenis pekerjaan sebagai pedagang (bekerja mandiri), ini disebabkan karena masih minimnya perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi kaum penyandang disabilitas sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga para

penyandang disabilitas melakukan pelatihan kerja dalam hal kreatifitas (membuat kerajinan olahan tangan, servis alat elektronik, dll) sehingga para penyandang disabilitas dapat membuka usahanya sendiri dirumah

4. Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan diketahui bahwa banyak penyandang disabilitas yang mengetahui maupun mencari informasi dari internet, ini karena semakin canggihnya dunia teknologi dan informasi sehingga untuk mengakses informasi bisa dengan mudah melalui internet namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya penyandang disabilitas maupun pendamping belum mengerti untuk menggunakan internet.
5. Banyaknya penyandang disabilitas yang melek teknologi serta merasa dimudahkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari di era digital

Sedangkan untuk threats/ancaman, diantaranya:

1. Ketidak tahuan penyandang disabilitas/wali mengenai informasi dan teknologi, hal ini bisa saja disebabkan karena tidak adanya alat teknologi seperti HP/laptop sehingga masih belum mengerti cara menggunakan teknologi dan informasi ataupun tidak ada yang mengajari dalam hal menggunakan alat teknologi
2. Tingkat kesejahteraan para penyandang disabilitas yang tergolong masih rendah, ini dilihat dari hasil kuesioner di lapangan bahwa jumlah pendapatan penyandang disabilitas perbulannya sebanyak Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 sebanyak 42%, sedangkan sebanyak 62% pengeluaran penyandang disabilitas/responden sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 yang dimana jumlah pendapatan hampir berbanding lurus dengan pengeluaran
3. Minimnya lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, ini dikarenakan masih sedikitnya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dimana pada pasal 26 dikatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada Perusahaannya”
4. Minimnya akses transportasi bagi penyandang disabilitas, ini dikarenakan masih belum adanya transportasi publik yang dibuat khusus untuk penyandang disabilitas
5. Infrastruktur penunjang pedestrian bagi penyandang disabilitas hanya terdapat di beberapa ruas jalan, karena masih belum adanya data mengenai persebaran jumlah penyandang disabilitas di setiap kecamatan sehingga Infrastruktur penunjang pedestrian bagi penyandang disabilitas masih belum merata disetiap wilayah yang terdapat penyandang disabilitas
6. Penyandang disabilitas masih sulit dalam mencari pendidikan formal, ini dikarenakan masih belum adanya sekolah negeri yang menjadi sekolah inklusi
7. Minimnya ketersediaan infrastruktur penunjang bagi penyandang disabilitas baik dari segi pendidikan, kesehatan, transportasi public, dan perkantoran
8. Belum terakomodasinya kebutuhan penyandang disabilitas dalam infrastruktur pedestrian, dan layanan kesehatan
9. Minimnya penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi umum
10. Minimnya toilet khusus bagi penyandang disabilitas di layanan kesehatan, pendidikan, maupun perkantoran. Sehingga perlu adanya program mengenai

melengkapi sarana prasana bagi penyandang disabilitas disetiap pelayanan umum

11. Belum sesuai antara peraturan dengan kondisi eksisting ini dapat terlihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dimana hampir semua perusahaan tidak membuka lowongan bagi penyandang disabilitas sehingga masih belum sesuai antara peraturan dengan kondisi eksisting serta masih kurangnya peraturan daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, khususnya mengenai sarana prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas disetiap pelayanan umum

Setelah mengidentifikasi dari kedua sisi yaitu internal dan eksternal maka dapat merumuskan strategi dari hasil identifikasi dari kedua sisi, berikut adalah rumusan strategi yang didapat dari *strength*/kekuatan dan *opportunities*/peluang:

1. Selalu melakukan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas/wali mengenai pentingnya pendidikan
2. Pelatihan persiapan kerja bagi penyandang disabilitas dijadikan sebagai kegiatan rutin tiap tahunnya
3. Mengikutsertakan para penyandang disabilitas dalam kegiatan pembangunan
4. Menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah tersedia baik infrastruktur pada layanan kesehatan, pendidikan, pedestrian, transportasi publik, dan perkantoran
5. Selalu memberikan/menyebarkan informasi melalui digital maupun non digital agar informasi tersebar secara merata

Berikut adalah rumusan strategi antara *weakness*/kelemahan dengan *opportunities*/peluang:

1. Melakukan komunikasi dan kordinasi kepada setiap SKPD mengenai penyusunan program bagi penyandang disabilitas
2. Melakukan update data tiap tahunnya mengenai jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas, penyebab, umur, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan
3. Melengkapi infrastruktur yang masih kurang lengkap/belum ada sama sekali baik pada layanan kesehatan, pendidikan, pedestrian, maupun perkantoran
4. Mewujudkan adanya sekolah inklusif dimana penyandang disabilitas dapat bersekolah di sekolah umum dan tidak hanya bersekolah di SLB saja
5. Selalu mengupdate/mengunggah informasi ke internet agar semua lapisan masyarakat mengetahui informasi tersebut khususnya penyandang disabilitas
6. Membuat program khusus bagi penyandang disabilitas mengenai fasilitas-fasilitas yang diperlukan (pelatihan kerja, lowongan pekerjaan, fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll)

Berikut adalah rumusan strategi antara *opportunities*/peluang dengan *threats*/ancaman:

1. Membuat desa percontohan yang ramah disabilitas/Desa Inklusi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas
2. Melakukan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pada infrastruktur penunjang bagi penyandang disabilitas baik pada layanan kesehatan, pendidikan, perkantoran, pedestrian, maupun transportasi public
3. Melakukan program CSR dengan pihak ke-3
4. Fasilitas pemberdayaan disabilitas perlu disusun dengan skema yang mampu mensejahterakan penyandang disabilitas
5. Pemberdayaan disabilitas dapat melingkupi seni yang dikembangkan serta diberikan peluang untuk terlibat sesuai bakat dan potensi penyandang disabilitas setempat

Sedangkan untuk rumusan strategi antara weakness/kelemahan dengan threats/ancaman:

1. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta terkait pelatihan persiapan kerja maupun dengan perusahaan yang membuka lowongan bagi penyandang disabilitas
2. Mempunyai system informasi yang baik dan terupdate yang dapat selalu diakses bagi penyandang disabilitas
3. Menyediakan/melengkapi fasilitas infrastruktur bagi semua jenis penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, kantor pelayanan pemerintah
4. Membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas terutama mengenai penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas baik dalam pemerintahan maupun swasta yang disesuaikan dengan kemampuan para penyandang disabilitas

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum tersedianya peraturan yang membahas mengenai kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas di pelayanan umum (layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, perkantoran, dll)
2. Masih belum sesuainya antara peraturan dengan kondisi eksisting ini dapat terlihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dimana hampir semua perusahaan tidak membuka lowongan bagi penyandang disabilitas sehingga masih belum sesuainya antara peraturan dengan kondisi eksisting serta masih kurangnya peraturan daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas
3. Kabupaten Bekasi belum memiliki program khusus untuk penyandang disabilitas berdasarkan dokumen RPJMD
4. Ketersediaan infrastruktur masih belum lengkap ataupun belum tersedia di Kabupaten Bekasi sebesar 90% ini terlihat dari hasil observasi lapangan
5. Penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi rata-rata memiliki jenis disabilitas sensorik dan hanya sedikit yang memiliki jenis disabilitas intelektual, mental, maupun fisik
6. Jumlah pendapatan rata-rata penyandang disabilitas sebanyak Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 tiap bulannya sedangkan pengeluaran tiap bulannya sebanyak Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 sedangkan tanggungan keluarga rata-rata sebanyak 2 orang sehingga pengeluaran hampir berbanding lurus dengan pendapatan oleh karena itu tingkat kemiskinan bagi penyandang disabilitas masih rendah
7. Masih sulitnya mengakses lowongan pekerjaan dikarenakan sedikitnya ketersediaan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas namun untuk ketersediaan infrastruktur penunjang bagi disabilitas di perkantoran sudah ada namun masih belum lengkap
8. Masih belum lengkapnya infrastruktur bagi penyandang disabilitas baik pada layanan kesehatan, pendidikan, perkantoran, pedestrian, maupun transportasi public
9. Infrastruktur bagi penyandang disabilitas baik pada layanan kesehatan, pendidikan, perkantoran, pedestrian, maupun transportasi public yang sudah tersedia memiliki kondisi yang baik hingga sedang

10. Banyaknya penyandang disabilitas mengetahui suatu informasi bersumber dari internet
11. Banyak juga penyandang disabilitas/wali yang tidak mengerti teknologi sehingga merasa kesulitan pada era digital ini
12. Sulitnya kordinasi antar dinas/instansi terkait

Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis pembangunan inklusif penyandang disabilitas yaitu:

1. Melakukan updating data mengenai jumlah penyandang disabilitas tiap tahunnya, serta berkordinasi dengan setiap instansi terkait untuk menyamakan data mengenai jumlah penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi lagi data-data yang berbeda di setiap instansi
2. Menyediakan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di setiap fasilitas umum seperti di taman/ruang terbuka hijau, toilet umum, pedestrian, dll
3. Pemeliharaan/perawatan infrastruktur yang sudah tersedia sehingga dapat digunakan lebih lama
4. Berkordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan program sekolah inklusi sehingga siswa penyandang disabilitas dapat bersekolah dengan siswa regular di sekolah inklusi
5. Perlu diketahui mengenai jumlah disabilitas terbanyak di Kabupaten Bekasi dan mengetahui ada tidaknya infrastruktur yang sudah tersedia bagi penyandang disabilitas
6. Perlu adanya penyediaan infrastruktur ramah disabilitas untuk setiap jenis penyandang disabilitas
7. Pihak Dinas Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 atau dengan perusahaan untuk penerimaan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas di setiap perusahaan
8. Selalu melakukan kegiatan pelatihan kerja seperti pelatihan menjahit/membuat baju, berdagang, membuat kerajinan dari barang bekas, dll bagi penyandang disabilitas agar lebih siap dalam mencari pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan.
9. Memperluas cakupan jaminan kesehatan dan mempermudah akses layanan kesehatan baik dari segi pelayanan maupun infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas
10. Membuat program-program khusus bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dll

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus M., Hertria M. P., Rani H. 2017. Usaha Budi Daya Ikan Lele (*clarias sp*) Pada Kawasan Minapolitan “Kampung Lele” Kabupaten Boyolali. Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 3 No. 2 Tahun 2017: 79-89. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/viewFile/7188/6000>
- Bene. C. *et al.* 2016. Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction: Assessing the Current Evidence. World Development Vol. 79, pp. 177–196. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.007>.

- Pent *et al.* 2014. Can aquaculture benefit the extreme poor? A case study of landless and socially marginalized Adivasi (ethnic) communities in Bangladesh. *Aquaculture* 418-419 (2014) 1-10. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.09.027>.
- Senff P *et al.* 2018. Improving Pond Aquaculture Production on Lombok, Indonesia. *Aquaculture* Volume 497, 1 December 2018, Pages 64-73. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.07.027>.
- Wang P., Jianyue Ji., Yi Zhang. 2020. Aquaculture extension system in China: Development, challenges, and prospects. *Aquaculture Reports* 17 (2020) 100339. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100339>.
- Mangampa M dan Burhanuddin. 2014. Uji Lapang Teknologi Polikultur Udang Windu (*Penaeus monodon* Fabr.), Ikan Bandeng (*Chanos chanos* Forskal) Dan Rumput Laut (*Gracilaria verrucosa*) Di Tambak Desa Borimasunggu Kabupaten Maros. *Jurnal Saintek Perikanan* Vol. 10 No.1 : 30-36, Agustus 2014.
- Setiadi E, Mumpuni F. S., Rosmawati, Maulana M. R. 2018. Difference in stocking density of Nile tilapia in polyculture system of giant prawns (*Macrobrachium rosenbergii*) and Nile tilapia (*Osteochilus vittatus*). *Journal Mina Sains*. 4(2):58-66.
- Dickson M., Ahmed Nasr-Allah., Diaa Kenawy., Froukje Kruijssen. 2016. Increasing Fish Farm Profitability Through Aquaculture Best Management Practice Training in Egypt. *Aquaculture* Volume 465, 1 December 2016, Pages 172-178. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.09.015>.
- Husain T. K., Mulyo J. H., Jamhari. 2016. Comparative analysis of the benefits and risks of smallholder monoculture and polyculture fisheries business in Pangkep Regency. 27(2):136-149.
- Sudirman A., Sinung R., Djumbuh R. 2020. Economical Analysis Of Polyculture Of Catfish And Tilapia Fish In Biofloc System. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)* Volume 9 Issue 02 Series I Pages PP 01-07 2020. ISSN (e): 2319-1813 ISSN (p): 01-07-1805.
- Soekartawi. 2006. Analisis Usaha Tani. Jakarta: UI Press
- Skousen K.F dan Smith, J.M., 2013, *Akuntansi Intermediate – Jilid 1 & 2*, Edisi kesembilan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Phyllis K., Weber-Scannell., Lawrence K. Duffy. 2007. Effects of Total Dissolved Solids on Aquatic Organisms: A Review of Literature and Recommendation for Salmonid Species. *American Journal of Environmental Sciences* 3 (1): 1-6, 2007 ISSN 1553-345X © 2007 Science Publications.
- Li W., Hao Wu., Nanyang Zhu *et al.*, 2020. Prediction of dissolved oxygen in a fishery pond based on gated recurrent unit (GRU), *Information Processing in Agriculture*, <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2020.02.002>.
- Morse J.W., F.J. Millero J.C., Cornwell., D. Rickard, 1987. The chemistry of the hydrogen sulfide and iron sulfide systems in natural waters, *Earth-Sci. Rev.* 24 (1987) 1-42.
- Tzvi Y dan Yaron Paz. 2019. Highly efficient method for oxidation of dissolved hydrogen sulfide in water, utilizing a combination of UVC light and dissolved oxygen. *Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry* 372 (2019) 63-70. <https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2018.12.005>.

- Direktorat Pembudidayaan, 2003. Petunjuk Teknis Budidaya Udang. Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. Jakarta.
- Boyd C.E., C.W. Wood., Taworn Thunjai. 2002. Aquaculture Pond Bottom Soil Quality Management. Oregon State University Corvallis, Oregon.